

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

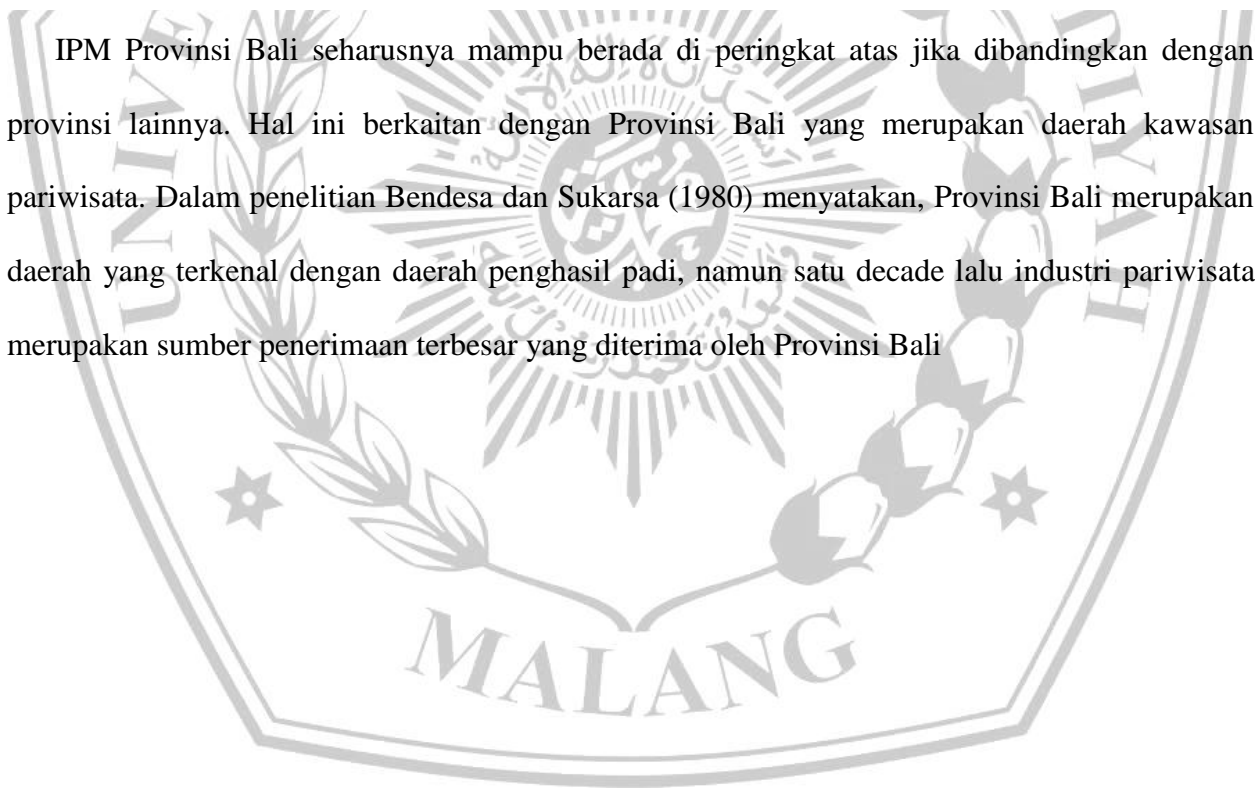
Pembangunan merupakan kegiatan yang digunakan untuk mencapai rencana yang dituju, sedangkan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penilaian keberhasilan dari pembangunan suatu negara. Dalam pelaksanaan pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah sasaran utama bagi negara-negara yang sedang berkembang. Raden Pardede dan Shirin Zahro (2017) mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan peningkatan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat, sehingga dengan semakin banyak barang dan jasa yang diproduksi, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Artana Yasa (2015) berpendapat bahwa pemerintah daerah dalam melakukan kebijakan pembangunan agar dapat memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan agar tercipta suatu kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan daerah sangat diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang sering terjadi di kota-kota tertentu seperti mengurangi tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, pendidikan yang rendah dan permasalahan lainnya antar kabupaten/kota sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat (Rosita, 2016). Ketimpangan serta kesenjangan yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh sumber daya manusia, perubahan demografi, pengangguran, dan migrasi sehingga kesejahteraan masyarakat menjadi tidak merata Silvia dkk (2014). Pembiayaan yang diberikan

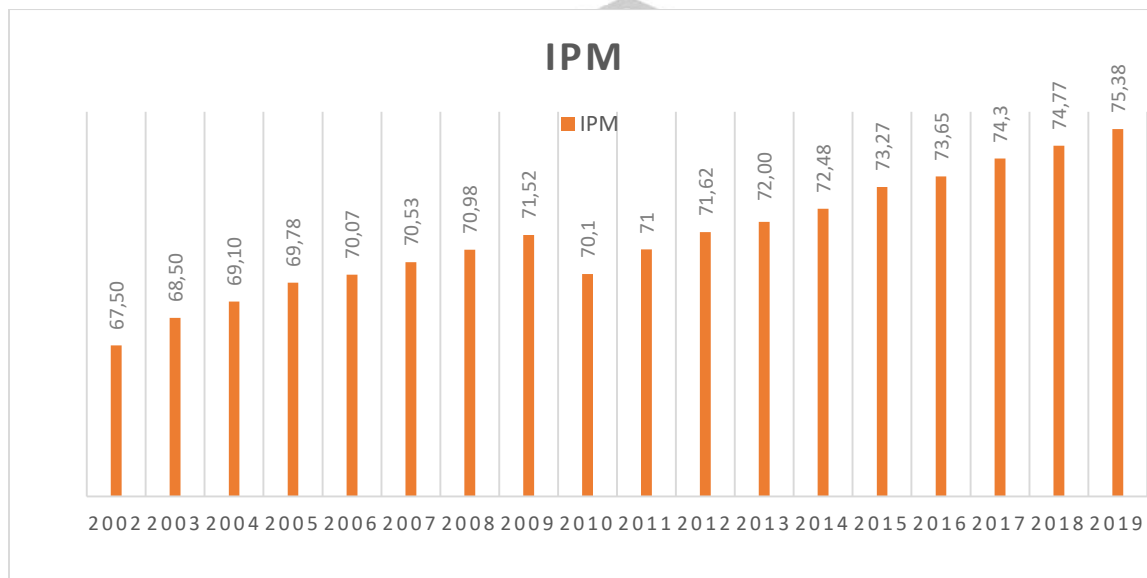
oleh pemerintah dapat membantu proses pertumbuhan sehingga pemerintah berperan sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi Dalamagas (2010).

Pembangunan yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. Pembangunan dilakukan oleh pemerintah yang tidak berdasarkan kebutuhan masyarakat dapat menimbulkan penurunan angka kesejahteraan masyarakat, yang dapat dipantau dengan cara melihat tinggi rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali tercatat mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2019, IPM Bali tercatat 75,38. Angka ini lebih tinggi 0,61 poin atau tumbuh sebesar 0,82 persen dibanding keadaan tahun 2018.

IPM Provinsi Bali seharusnya mampu berada di peringkat atas jika dibandingkan dengan provinsi lainnya. Hal ini berkaitan dengan Provinsi Bali yang merupakan daerah kawasan pariwisata. Dalam penelitian Bendesa dan Sukarsa (1980) menyatakan, Provinsi Bali merupakan daerah yang terkenal dengan daerah penghasil padi, namun satu decade lalu industri pariwisata merupakan sumber penerimaan terbesar yang diterima oleh Provinsi Bali



Gambar 1.1 Tingkat Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bali 2002 – 2019



Berdasarkan Grafik 1.1 dapat dilihat bahwa telah terjadi peningkatan setiap tahunnya pada angka IPM di Provinsi Bali. Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Bali mengalami peningkatan setiap tahunnya mulai dari tahun 2002 – 2019. Nilai IPM yang terendah terdapat pada tahun 2010 sebesar 70.10%. Sedangkan IPM tertinggi terdapat pada tahun 2019 sebesar 75,38. Hal ini merupakan suatu pencapaian yang baik terhadap IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di Provinsi Bali, karena IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang berada di Provinsi Bali tiap tahun mengalami peningkatan yang signifikan.

Penanggulangan kemiskinan menjadi persoalan utama dalam pembangunan nasional dan daerah, terutama sejak adanya pemberlakuan undang-undang tentang pemerintahan daerah. Hal

tersebut seharusnya dijadikan momentum dan peluang oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan desentralisasi pembangunan daerah yang sensitif terhadap persoalan lokal. Berarti memperbaiki masalah kemiskinan secara tidak langsung memperbaiki banyak persoalan sosial yang dihadapi oleh pemerintah daerah.

Kemiskinan merupakan konsep yang dikaitkan dengan kesejahteraan manusia yang meliputi berbagai aspek tentang kemakmuran misalnya pendapatan, kesehatan, dan keamanan. Dilain sisi kemiskinan yang menjadi masalah penduduk miskin sebagai alasan ketidak berdayaan telah mengambil perhatian masyarakat dunia, sehingga isu kemiskinan menjadi salah satu isu sentral dalam Millenium Development Goals (MDG's) yang dideklarasikan oleh PBB pada tahun 2000, namun keberlanjutan program MDG's di bahas kembali pada era Sustainable Development Goals (SDG's). himbauan dari PBB yang mengharapkan seluruh negara yang menjadi anggotanya dapat mengurangi jumlah penduduk miskin dan kekurangan pangan dimasing-masing negara hingga 50 persen pada tahun 2015 (Swaras, 2012). Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan sandang dan pangan seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan.

Tabel 1.2 Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Bali Periode 2002-2019

Tahun	Kemiskinan
2002	221.800
2003	246.100
2004	231.900
2005	228.400

2006	243.500
2007	229.100
2008	205.700
2009	173.600
2010	221.600
2011	183.100
2012	152.950
2013	182.770
2014	196.000
2015	196.710
2016	178.180
2017	180.130
2018	171.760
2019	163.850

Berdasarkan data pada Tabel 1.2 terlihat bahwa jumlah Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bali mengalami penurunan dan peningkatan setiap tahunnya dengan angka yang berfluktuatif. Namun, jika dilihat kembali pada jumlah IPM yang meningkat dan jumlah yang Fluktuatif pada Tingkat Kemiskinan, masih banyak jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan di Provinsi Bali. Kenyataan ini patut menjadi perhatian penting bagi pemerintah dalam menilai kinerja perekonomian provinsi-provinsi di Indonesia. Sehingga belum adanya pemerataan kesejahteraan antar daerah di Indonesia. Kondisi ini terjadi akibat adanya dominasi perekonomian oleh provinsi-

provinsi tertentu. Oleh karena itu dibutuhkan pemahaman yang mendalam akan penyebab tingginya tingkat kemiskinan di sebagian besar Provinsi di Indonesia, sehingga nantinya diharapkan dapat memecahkan permasalahan kemiskinan di Indonesia sesuai dengan kondisi masing-masing provinsi (Samputra, 2019).

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah dan tingkat kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di daerah Bali Periode 2002-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis atau mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di daerah Bali Periode 2002-2019.
2. Untuk menganalisis atau mengetahui pengaruh Tingkat kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di daerah Bali Periode 2002-2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diperoleh oleh peneliti dari penelitian ini

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah terhadap tingkat kemiskinan dan indeks pembangunan manusia di suatu Kabupaten/Kota Provinsi.

2. Bagi Investor

Penelitian ini dapat dijadikan referensi terhadap investor ketika akan melakukan investasi di suatu daerah dengan menganalisis tingkat PADnya.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa yang ingin mengetahui secara jelas bagaimana pendapatan asli daerah yang berada di Pulau Bali

